

## BUKU

- Ammiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anggriani, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Asshididqie, Jimly dan M. Ali Shafa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Asshididqie, Jimly, 2010, *Perihal Undang-Undang*, PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta.
- Erwin, Muhammad, 2016, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis terhadap hukum dan Hukum di Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, cetakan keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hakim, Lukman, 2012, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang.
- Hamidi, Jazim dan Kemilau Mutik, 2011, *Legislative Drafting*, Total Media, Yogyakarta.
- HR, Ridwan, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- , 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta.
- , 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung.
- Hudjon, Philpus M, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- , 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ilmar, Aminuddin, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta.
- Jeddawi, Murtir, *Hukum Administrasi Negara*, 2012, Total Media, Yogyakarta.
- Kelsen, Hans, 2010, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Alih bahasa oleh : Soemardi, Cetakan ketiga, Bee Media, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhso, Ali dan Supriyanto, 2009, *Ekonomi*, Jakarta, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Mubyarto, 1987, *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan kemungkinan*, Jakarta, LP3ES.
- Nurhayati, 2011, *Peningkatan Sumber Daya Manusia Menuju Ekonomi Rakyat Berbasis Koperasi Indonesia*, Semarang, Universitas Muhamadiyah Semarang.
- MD, Moh Mahfud, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta, Gama Media.

Grafindo Persada, Jakarta.

MD, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cetakan ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ridwan, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, cetakan kelima, PT.Citra Aditya Bhakti, Semarang.

Rahardjo, Satjipto, 2011, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, cetakan II, Genta Publishing, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Keempat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soeprapto, Maria Farida Indarti, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta.

Sunarno, Siswanto, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2017, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika.

Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sulaeman, Zulfikri, 2010, *Demokrasi Untuk Indonesia*, Jakarta, Kompas.

Yani, Ahmad, 2011, *Pembentukan Undang-Undang dan Perda*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 67).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011  
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan  
Perizinan Usaha Toko Modern

## JURNAL DAN KARYA ILMIAH LAINNYA

Apriadi, Riko, “Analisis Yuridis Pengaturan Asas Keseimbangan Kepentingan  
Ritel Modern Dengan Pasar Tradisional Dalam Peraturan Daerah  
(Perbandingan Kota Surakarta Dengan Kota Malang)”, *Skripsi*, 2014,  
Universitas Brawijaya, Malang.

Fitri, Nurul, “Analisis Dampak Usaha Ritel Modern Terhadap Usaha Ritel  
Tradisional Di Kota Yogyakarta”, *Skripsi*, 2017, Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Hoesein, Zainal Arifih, “Peran Negara Dalam Peembangan Sistem Ekonomi  
Kerakyatan Menurut UUD 1945”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* , No.  
3, Vol. 23, Juli 2016.

Ghafur, Ruslan Abdul, “Sistem Ekonomi Antara Kebijakan dan Tujuan”, *Jurnal  
ASAS*, Vol.2, No.1, Januari 2010.

Lutfi, Ok Laksemama, Dampak Keberadaan Indomaret Terhadap Kondisi Sosial  
Ekonomi Perdagangan Pasar Tradisional di Kelurahan Terjun  
Kecamatan Medan Marelan, dalam *Jurnal Welfare State*, Vol 2, Nomor  
1 tahun 2013.

Marojohan S. Panjaitan, “Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam  
Prespektif Negara Hukum Kesejahteraan Berdasarkan UUD 1945”,  
*Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 26, No. 01, Februari 2012.

Raharja, Ivan Fauzani, “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap  
Pelanggaran Perizinan”, *Jurnal Inovatif*, Volume VII No.II Mei 2014

Rusno, “Dampak Pesatnya Mini Market Waralaba Terhadap Usaha Kecil (Jenis  
Ritel)”, *Jurnal Ekonomi*, Vol.4, No.3, Oktober 2008.

Sumaria, Anis, “Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Keberadaan Pasar  
Tradisional Di Kabupaten Klaten”, *Skripsi*, 2014, Universitas  
Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Panjaitan, Marojohan S, “Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam  
Prespektif Negara Hukum Kesejahteraan Berdaarkan UUD 1945”,  
*Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.26, No.1 Februari 2012.

## INTERNET

- Katadata.co.id, “Gerai Alfamart dan Indomaret Masih Ekspansi”,  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/10/05/gerai-alfamart-dan-indomaret-masih-ekspansi>, diakses pada 22 Januari 2019
- Katadata.co.id “Berapa jumlah Gerai Alfamart?”  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/09/berapa-jumlah-gerai-alfamart>, diakses pada 31 Juli 2019
- Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan, “Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional”,  
<https://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/program-kerja/training-workshop/>, diakses pada 31 Juli 2019
- Menpanrb, “Tomira, dari Kulon Progo untuk Indonesia”,  
<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/tomira-dari-kulon-progo-untuk-indonesia-2>, diakses pada 2 Mei 2019
- Beritahati.com, “Bupati Kulon Progo larang Alfamart dan Indomart Hadir di Wilayahnya,”  
<http://www.beritahati.com/berita/34781/Bupati%2BKulonprogo%2Bblarang%2Balfamart%2Bdan%2BIndomart%2Bhadir%2Bdi%2Bwilayahnya>, diakses pada 22 Januari 2019
- Hasto Wardoyo, “Kemandirian Ekonomi Daerah Untuk Mengurangi Disparitas”,  
<https://indonesiadevelopmentforum.com/download/index/1641>. diakses pada 22 Januari 2019
- Harianjogja, “Disulap Jadi Tomira, Seluruh Toko Berjejaring Kulon Progo akan diakuisisi Pemkab”,  
<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/03/04/514/975801/disulap-jadi-tomira-seluruh-toko-berjejaring-di-kulonprogo-akan-diakuisisi-pemkab>, diakses pada 22 Mei 18 Mei 2019
- Starjogja.fm, Toko Modern Harus Jual Produk Lokal Kulonprogo,  
<https://www.starjogja.com/2017/08/05/toko-modern-harus-jual-produk-lokal-kulon-progo/>, diakses pada 17 Mei 2019
- Tribunnews, “Sutedjo Resmikan Tomira Ke-17 di Bendungan”,  
<https://jogja.tribunnews.com/2019/07/09/sutedjo-resmikan-tomira-ke-17-di-bendungan>, diakses pada 31 Agustus 2019
- Tribun news, “Kamis ini, Satpol PP Klaten Akan Tutup 19 Toko Modern Berjejaring Tak Berizin”,  
<http://solo.tribunnews.com/2016/04/14/kamis-ini-satpol-pp-klaten-akan-tutup-19-toko-modern-berjejaring-tak-berizin>, diakses pada 23 Januari 2019
- Pemerintah Kabupaten Klaten, “Pemkab Klaten Tutup 29 Toko Modern Berjejaring”  
<https://klatenkab.go.id/pemkab-klaten-tutup-29-toko-modern-berjejarin-g/> diakses pada 23 Januari 2019
- Gatra, Alfamart Salin nama di Solo-Prambanan? Ini Jawaban Alfamart,  
<https://www.gatra.com/rubrik/ekonomi/pasar-jasa-keuangan/235822-alfamart-salin-nama-di-solo-prambanan-ini-jawaban-alfamart> diakses pada 24 Januari 2019
- Pusat Penelitian Politik, “Hubungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam



**PERBANDINGAN SISTEM PEMBATASAN PENGUSAHAAN TOKO MODERN BERJARINGAN DI  
KABUPATEN KULONPROGO DAN  
KABUPATEN KLATEN**

HIDAYATU KHAWAMA, Rizki Andri Widiyo, S.H., K.V., Ph.D politik-lokal/110/-hubung  
an-kerjasama-pemerintah-dengan-pihak-swasta-dalam-pembangunan-in-  
frastruktur-di-indonesia, diakses pada 31 Agustus 2019

Koran Bernas, “Toko Modern Harus Berjarak 2 Km dari Pasar Tradisional”,  
[https://www.koranbernas.id/berita/detail/toko-modern-harus-berjarak-2-  
km-dari-pasar-tradisional](https://www.koranbernas.id/berita/detail/toko-modern-harus-berjarak-2-km-dari-pasar-tradisional), di akses pada 1 Oktober 2019